



## **Perilaku Organisasi Terhadap Upaya Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Buton Tengah**

## **Organizational Behavior Towards Efforts to Reduce Stunting Prevalence in Buton Tengah Regency**

Hardianty Munawir<sup>1\*</sup>, La Ode Syaiful Islamy<sup>2</sup>, Syahril Ramadhan<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Kota Baubau, Indonesia  
Email : hardiantymunawir@gmail.com\*, syaiful80islamy@gmail.com, rilramadhan761@gmail.com

### **Abstrak**

Penurunan prevalensi stunting merupakan investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat besar bagi individu, masyarakat, dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku organisasi terhadap penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan ditentukan dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dari pemangku kebijakan dan Organisasi Perangkat Daerah telah ter-mapping dengan baik. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah mengalokasikan anggaran khusus sebagai bentuk aksi percepatan penurunan stunting. Di sisi lain, koordinasi antara pemangku kebijakan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait meskipun sudah dilaksanakan namun masih menghadapi hambatan. Hambatan tersebut meliputi ketersediaan sistem manajemen data yang terintegrasi serta kurangnya konsistensi beberapa stakeholder dalam proses koordinasi. Upaya yang lebih terkoordinasi dan konsisten diperlukan untuk mencapai penurunan prevalensi stunting secara efektif. Implementasi strategi yang komprehensif, termasuk penguatan sistem manajemen data dan peningkatan kolaborasi antar pihak terkait, sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Kata kunci: Perilaku Organisasi; Stunting; Organisasi Perangkat Daerah; Konvergensi; Kebijakan

### **Abstract**

*Reducing the prevalence of stunting is a long-term investment that will bring great benefits to individuals, communities and countries. This research aims to describe organizational behavior towards reducing the prevalence of stunting in Central Buton Regency using a descriptive qualitative approach. Informants were determined using the purposive sampling method. Data was collected by interviews, observation and documentation. The research results show that the commitment of policy makers and Regional Apparatus Organizations has been well mapped. The Central Buton Regency Government has allocated a special budget as a form of action to accelerate stunting reduction. On the other hand, coordination between policy makers and related Regional Apparatus Organizations, although it has been implemented, still faces obstacles. These obstacles include the availability of an integrated data management system and the lack of consistency among several stakeholders in the coordination process. More coordinated and consistent efforts are needed to achieve an effective reduction in stunting prevalence.*

*Implementation of a comprehensive strategy, including strengthening data management systems and increasing collaboration between relevant parties, is critical to achieving this goal.*

*Keywords: Organizational Behavior; Stunting; Regional Apparatus Organizations; Convergence; Policy*

## I. PENDAHULUAN

Perilaku organisasi dalam upaya penurunan prevalensi stunting adalah kunci untuk keberhasilan implementasi program dan kebijakan yang efektif. Para ahli telah mengkaji berbagai aspek perilaku organisasi yang dapat mempengaruhi hasil intervensi kesehatan masyarakat, termasuk penurunan stunting. Perilaku organisasi yang efektif dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Implementasi kebijakan yang berhasil tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan yang tepat, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan oleh berbagai aktor yang terlibat.

Stunting atau pertumbuhan kerdil pada balita merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi oleh balita di seluruh dunia saat ini, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Stunting adalah masalah gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah dua tahun, dimana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kondisi ini diukur dengan tinggi badan yang lebih dari minus 2 (dua) standar deviasi di bawah standar median yang ditetapkan oleh WHO (Shauna & Purbaningrum, 2022; WHO, 2018).

Sehubungan dengan itu, kebijakan nasional yang diimplementasikan untuk pencegahan stunting adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam perbaikan gizi, terutama dalam penurunan stunting, serta bertepatan dengan lebih dari satu dekade Indonesia bergabung dalam gerakan Global Scaling Up Nutrition sejak tahun 2011 yang berfokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor.

Pada akhir tahun 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan prevalensi stunting tahun 2021 yang sebesar 24,4%. Meskipun ada peningkatan, prevalensi stunting di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%). Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Buton Tengah masih termasuk kategori tinggi dengan prevalensi 41,6%, yang dianggap masih tinggi. Wilayah Kabupaten Buton Tengah terdiri dari 7 Kecamatan dengan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak

14 Puskesmas terdiri dari 7 Puskesmas Induk dan 7 puskesmas Satelit. Kabupaten Buton Tengah menurut Kecamatan mengalami fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Tren angka Stunting per kecamatan memperlihatkan bahwa kecamatan yang paling tinggi penurunan prevalensi stuntingnya terjadi pada kecamatan mawasangka Timur sejak tahun 2021 yaitu sebesar 12,8% pada tahun 2022 dan 2,3% pada Tahun 2023. Penurunan yang konsisten juga terjadi di Kecamatan Mawasangka Tengah yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun tidak secara signifikan yaitu 34,2% pada tahun 2021 turun menjadi 33,6% pada tahun 2022 dan menjadi 20,1% pada tahun 2023%, terjadi penurunan sebesar 13,5%.

Sebaran Prevalensi Stunting dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi penurunan pada enam kecamatan yaitu, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Talaga Raya dan Kecamatan Lakudo. Sedangkan satu Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Sangia Wambulu mengalami Peningkatan Prevalensi Stunting sebesar 0,1%. Terdapat dua Kecamatan yang angka Stuntingnya dibawah standar nasional 16% yaitu Kecamatan Gu (8,3%) dan Kecamatan Talaga Raya (9,5%).

Pendekatan Para Ahli terhadap Perilaku Organisasi dalam Penurunan Stunting yaitu Soren C. Winter menekankan pentingnya konteks implementasi dan bagaimana interaksi antara struktur organisasi, proses kebijakan, dan lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan kebijakan dan Ripley & Franklin menyoroti bahwa kepatuhan, koordinasi, dan sumber daya adalah faktor kunci dalam implementasi kebijakan serta pentingnya keterlibatan berbagai aktor dan koordinasi lintas sektor.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang percepatan penurunan stunting yaitu Ridua I, Djurubassa G, 2022 dengan judul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam Menanggulangi Masalah Stunting Mengkaji masalah stunting yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Halmahera Timur namun lebih khusus di Kecamatan Maba Utara serta mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan stunting ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Halmahera Timur khususnya di Kecamatan Maba Utara sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya baik karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Terkait mengenai permasalahan dan upaya penanganannya hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku organisasi menjadi indikator penting dalam upaya penurunan stunting sehingga penelitian ini berfokus pada perilaku organisasi terhadap penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji situasi alami dari objek penelitian, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik

pengumpulan data dilakukan secara kombinasi, sementara analisis data bersifat induktif dan kualitatif.

Data primer, baik kuantitatif maupun kualitatif, dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan responden sampel. Sementara itu, data sekunder kuantitatif dikumpulkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Dinas Pangan, Dinas Sosial, dan lainnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Profil Buton Tengah

Kabupaten Buton Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru pemekaran dari Kabupaten Buton yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang sebagian wilayahnya berada di Pulau Muna sebagian lainnya kepulauan Talaga dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 5,15° Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur di antara 122,33° Bujur Timur.

Kabupaten Buton Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Kabupaten Buton Tengah memiliki wilayah daratan seluas ±837,08 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 7 kecamatan dengan ibu kota di Labungkari, terdiri dari 7 kecamatan yang membawahi 76 desa/kelurahan.

- 1) Kecamatan Gu: Terdiri dari 10 desa dan 2 kelurahan, dengan ibu kota di Lombe.
- 2) Kecamatan Sangia Wambulu: Terdiri dari 5 desa dan 1 kelurahan, dengan ibu kota di Tolandona.
- 3) Kecamatan Lakudo: Terdiri dari 12 desa dan 3 kelurahan, dengan ibu kota di Lakudo.
- 4) Kecamatan Mawasangka: Terdiri dari 17 desa dan 2 kelurahan, dengan ibu kota di Mawasangka.
- 5) Kecamatan Mawasangka Timur: Terdiri dari 8 desa, dengan ibu kota di Lamena.
- 6) Kecamatan Mawasangka Tengah: Terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan, dengan ibu kota di Lakorua.
- 7) Kecamatan Talaga Raya: Terdiri dari 5 desa dan 1 kelurahan, dengan ibu kota di Talaga I.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Mawasangka dengan luas 229,02 km<sup>2</sup>, diikuti oleh Lakudo dengan luas 204,3 km<sup>2</sup>, dan

Mawasangka Tengah dengan luas 121,99 km<sup>2</sup>. Masing-masing mencakup 27,36%, 24,41%, dan 14,57% dari total luas wilayah Kabupaten Buton Tengah. Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sangia Wambulu dengan luas 5,91 km<sup>2</sup> atau 0,71% dari total luas wilayah Kabupaten Buton Tengah. Luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Buton Tengah disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Ibukota Capital</b>	<b>Luas <sup>1</sup>(km<sup>2</sup>) Area <sup>1</sup>(sq.km )</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Talaga Raya	Talaga Satu	89,49
Mawasangka	Mawasangka	229,02
Mawasangka Tengah	Lakorua	121,99
Mawasangka Timur	Lasori	93,35
Lakudo	Lakudo	204,30
Gu	Watulea	93,10
Sangia Wambulu	Tolandona	5,91
<b>Buton Tengah</b>	<b>Labungkari</b>	<b>837,16</b>

### Implementasi Kebijakan Publik

Winter dalam (Henriyani, 2019) memperkenalkan model implementasi integratif (Integrated Implementation Model). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Model Soren Winter mengemukakan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni:

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi
2. Perilaku implementor (aparatus/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional.
3. Perilaku kelompok sasaran.

Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat Winter dalam Piore (2003).

## Perilaku Organisasi dalam Upaya Penurunan Stunting

Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi. Terkait konvergensi kebijakan tentu di pengaruhi perilaku organisasi sebagai tolak ukur untuk mencapai pelaksanaan konvergensi kebijakan penanganan stunting di Buton Tengah. Perilaku organisasi dalam konvergensi kebijakan penanganan stunting menjadi penting sebagai tolak ukur karena secara langsung membantu produktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perilaku organisasi yang mendukung kolaborasi antar unit atau departemen akan memperkuat konvergensi kebijakan dalam prosesnya dibutuhkan komunikasi organisasi yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Kolaborasi yang baik memungkinkan berbagai pihak terlibat bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan program penanganan stunting yang holistik dan terintegrasi sehingga sumber daya seperti anggaran, personel, dan infrastruktur dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini karena adanya koordinasi yang baik mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. Konvergensi kebijakan yang didukung oleh perilaku organisasi yang progresif dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk dalam hal penanganan Stunting.

Tabel 2. Reduksi Data Perilaku Organisasi

Komponen	Informan	Kecenderungan Jawaban	Kesimpulan
Komitmen Organisasi	1,2,5,6,7,8	Memiliki komitmen untuk mengatasi masalah gizi buruk, termasuk stunting, melalui berbagai program dan kebijakan sejak 2020	Komitmen dan Program: Mayoritas organisasi menunjukkan komitmen yang kuat dan memiliki program khusus untuk penanganan stunting. Namun, masih ada
	3,4,11,12	Memiliki komitmen yang cukup melalui program pendukung untuk mengatasi masalah gizi buruk, termasuk stunting	
	15	Belum memiliki program khusus terkait stunting	
	10,16	Belum familiar dengan program penurunan stunting	
Agenda Rapat Rutin	1,2,4,5,6, 11,12	Turut aktif dan menjadi partisipan dalam setiap agenda rapat rutin	

Komponen	Informan	Kecenderungan Jawaban	Kesimpulan
	3,7,8,10,16	Sering mengadakan monev di lingkungan internal opd/perkumpulan masing-masing	beberapa yang kurang familiar atau tidak mengetahui secara rinci mengenai program ini.
Program Penanganan Stunting	1,2,4,5,6,11,12,13,14,15	Memiliki program khusus dalam perencanaan APBD dalam target percepatan penurunan stunting	
	3,7,8	Kurang mengetahui secara rinci mengenai program	Partisipasi Aktif: Tingkat partisipasi dalam rapat rutin cukup tinggi, dan banyak informan yang melakukan monitoring dan evaluasi internal.
	9,10,11	Tidak mengetahui secara rinci mengenai program	
Alokasi Anggaran	1,2,4,5,6,11,12,13,14,15	Memiliki anggaran khusus dalam perencanaan APBD dalam target percepatan penurunan stunting	Alokasi Anggaran: Sebagian besar organisasi memiliki anggaran khusus untuk penanganan stunting, meskipun ada beberapa yang kurang
	3,7,8	Kurang mengetahui secara rinci mengenai anggaran	
	9,10,11	Tidak mengetahui secara rinci mengenai anggaran	

Komponen	Informan	Kecenderungan Jawaban	Kesimpulan
			<p>mengetahui atau tidak mengetahui rincian alokasi anggaran ini.</p> <p>Perlunya Sosialisasi dan Edukasi: Diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut untuk memastikan semua pihak terkait memahami detail program dan anggaran penanganan stunting.</p>

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa keterangan terkait perilaku organisasi dalam menyikapi konvergensi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Buton Tengah. Buton Tengah telah menindaklanjuti Peraturan Bupati turunan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Tengah yang di dalamnya, termuat strategi percepatan penurunan stunting yang meliputi penguatan upaya konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran hingga tingkat desa/kelurahan bersama pemangku kepentingan secara berkesinambungan, penguatan dan panduan sistem manajemen data serta informasi untuk percepatan penurunan stunting, penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program serta kegiatan penurunan stunting, partisipasi aktif masyarakat dan gotong royong dalam upaya percepatan penurunan stunting, integrasi mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan

penurunan stunting, serta penguatan regulasi atau kebijakan strategis yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting.

Informan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah menggunakan pendekatan keluarga beresiko stunting yaitu dengan melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting, pendampingan kepada semua calon pengantin, surveilans keluarga beresiko stunting, mengaudit kasus stunting, pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita stunting dan anak sekolah usia dini dan ibu hamil resiko tinggi serta pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, dan peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga.

Perilaku organisasi dalam hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang ditunjukkan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan stunting di antara organisasi perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. Mereka juga memastikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting. Tim ini menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota, merumuskan dan memfasilitasi manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara lintas sektor di tingkat kabupaten, membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta melaporkan pelaksanaan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah satu kali sebulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Informan menyampaikan selain membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2024 Kabupaten Buton Tengah di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Lakudo dengan lokasi fokus Lolibu, Boneoge, Madongka, Lakudo, Waara dan One Waara; Kecamatan Gu dengan lokasi fokus Bombonawulu, Watulea dan Lowu-lowu; Mawasangka dengan lokasi fokus Watolo, Terapung, Mawasangka, Napa, Kance Bungi, dan Polindu; Kecamatan Mawasangka Tengah dengan lokasi fokus Langtongau, Morikana, dan Katukobari; Kecamatan Mawasangka Timur dengan lokasi fokus Batubanawa; Kecamatan Talaga Raya dengan lokasi fokus Talaga Besar, Liwu Lompona, Kokoe dan Talaga I.

Saat ini rapat evaluasi percepatan penurunan stunting dilakukan setiap triwulan atau sewaktu-waktu jika ada permasalahan urgent terkait penanganan stunting seperti RT 1000 HPK yang masih bermasalah yaitu Praktek Pemberian

ASI eksklusif sampai Usia 6 Bulan, Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan anggota keluarga terutama suami dan pengaruh dari mertua dan orang tua serta pemahaman manajemen laktasi yang kurang. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui sudah sejauh mana aksi yang dilakukan dan kendala-kendala apa yang terdapat di lapangan. Dibutuhkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam konvergensi kebijakan penanganan stunting agar target dan tujuan dapat tercapai, informan menjelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait telah diberikan alokasi anggaran khusus dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah.

Program yang telah terealisasi meliputi peluncuran Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan Rumah Dataku untuk mempercepat penurunan stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan indikator pencapaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Pada awal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah membentuk 46 Kampung KB baru yang tersebar di tujuh kecamatan. Untuk mencapai target, pada awal tahun 2024 nanti, akan dibentuk 24 Kampung KB baru lagi, sehingga pada akhir tahun 2024, semua desa dan kelurahan, yang berjumlah 67 desa dan 10 kelurahan, akan menjadi Kampung KB. Selain itu, program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kampung KB adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi gizi seimbang bagi keluarga yang berisiko stunting dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan kontribusi kemitraan lainnya.

Selain itu konvergensi penanganan stunting juga dilaksanakan dengan program di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu pembangunan instalasi pengolahan air, perluasan sarana prasarana air minum dan jaringan perpipaan dengan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 18,717,377,000 di beberapa lokasi fokus Gumamano, Morikana, Lantongau, Langkomu, Katukobari, dan Lolibu yang merupakan bagian dari intervensi sensitive dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah. Lebih lanjut keterangan informan menyampaikan bahwa secara regulasi dan sasaran target penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah sudah jelas dan selaras dengan target penurunan prevalensi stunting nasional, namun dalam implementasinya kebijakan percepatan penurunan stunting masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang bahkan belum memaknai dengan baik terkait standar, tujuan dan sasaran dalam upaya konvergensi kebijakan penurunan stunting yang tentu dibutuhkan keseragaman komitmen dan pemahaman dalam mengeksekusi rencana aksi yang telah dirumuskan dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Soren C. Winter, konteks kebijakan mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta struktur kebijakan dan aktor-aktor utama. Dalam konteks Kabupaten Buton Tengah Kebijakan penanganan stunting diimplementasikan dalam lingkungan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi,

dan politik tertentu yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang serta dukungan keluarga menjadi faktor penting. Adanya Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi dan mengkonkretkan kebijakan nasional di tingkat lokal. Pada proses implementasi kebijakan Winter menekankan pentingnya pemahaman, kapabilitas, komunikasi, dan aktivitas implementasi. Sementara Ripley & Franklin fokus pada COMPLIANSI, hasil, dan dampak.

Ada indikasi bahwa meskipun kebijakan telah disosialisasikan, beberapa Organisasi Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya memahami standar, tujuan, dan sasaran kebijakan. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pendidikan terkait kebijakan tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN**

Perilaku Organisasi sudah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah telah terkoordinasi dengan baik dicerminkan dari koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah bersama stakeholder terkait namun implementasinya belum berjalan dengan baik, dibutuhkan pengawasan dan konsistensi secara terus menerus agar penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah dapat mencapai target tahun 2024 yaitu 18%. Perilaku organisasi yaitu komitmen dari pemangku kebijakan dan Organisasi Perangkat Daerah telah ter-mapping dengan baik, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah mengalokasikan anggaran khusus sebagai bentuk aksi percepatan penurunan stunting. Di sisi lain koordinasi yang dilakukan antara Pemangku Kebijakan dan OPD terkait meskipun sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam hal ketersediaan system manajemen data yang terintegrasi serta kurang konsistennya beberapa stakeholder dalam proses koordinasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Fauziah, F., & Novandi, D. (2021). Aksi Pencegahan Kasus Stunting Di Kota Samarinda Melalui Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). *Jurnal Riset Inossa: Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam*, 3(2), 76–86.
- Folensino, Silsilah. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Buton. Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- Hariadi, B. (2005). Strategi Manajemen Jakarta. Bayumedia Publishing.
- Hemeto, A. O., Ratnasari, D., & Saputra, A. (2023). Aktivitas Komunikasi Organisasi dalam Mempertahankan Solidaritas Organisasi HMP-IK Universitas Ichsan Gorontalo. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 45-58.

- La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin, dkk (2023). Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting. Deepublish.
- Lailiyah, K. (2023). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 16–33.
- Marrus, S. K. (2002). *Buliding The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information*. Wiley.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muh Kabul, L. (n.d.). *Penanganan Stunting Dalam Perspektif Model Kebijakan Konvergensi Di Kabupaten Lombok Timur*
- NEGARA, B. H. A. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*.
- Nawawi, H. (2008). *Dinamika Strategi program Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Podungge, A. W., Podungge, A. M., & Ibrahim, A. M. (2023). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 123-145.
- Ridua, I. R., & Djurubassa, G. M. P. (2020). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 135–151.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Saputri, R. A. (2019). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 152–168
- Winter, S. C. (2003). "Implementation: A Theoretical Perspective." In *Handbook of Public Administration*. Sage.